

ABSTRAK

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 40 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Diberikannya hak untuk mendapatkan tempat tinggal adalah diberikannya rumah atau hunian salah satunya dalam bentuk rumah susun. Untuk mengatur rumah susun dalam penyelenggaraannya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Salah satu yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mengatur bagi pelaku pembangunan atau badan usaha yang melaksanakan pembangunan dari rumah susun. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 2019 rumah susun diantaranya belum memenuhi indikator rumah yang layak.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak atas rumah yang layak bagi masyarakat rumah susun sederhana sewa (rusunawa) ditinjau dari Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan Undang-Undang No 20 tahun 2011 tentang rumah susun dan terhadap pemenuhan hak atas rumah yang layak bagi masyarakat di rumah susun sederhana sewa Cingised Kota Bandung berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-hubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu.

Hasil penelitian ini adalah pemenuhan terhadap hak atas rumah yang layak bagi masyarakat di rumah susun sederhana sewa cingised belum terpenuhi secara optimal. Karena dalam prakteknya terhadap indikator fasilitas seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dari setiap hunian unit sarusun seharusnya memiliki ruang yang cukup dan tersedianya ruang privasi untuk anak dan orang tua. Artinya diharapkan dalam setiap unit hunian sarusun memiliki 2 kamar. Namun dalam praktiknya hanya ada ruangan yang telah dibagi atas ruang utama, ruang dapur dan kamar mandi.

Kata Kunci : Rumah Susun Sederhana Sewa, Indikator Rumah Layak, Ruang Privasi

ABSTRACT

Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and to have a good and healthy environment and to have health services. In addition, Article 40 of the Human Rights Law stipulates that every person has the right to live and live properly. Given the right to get a place to stay is given a house or residence one of them in the form of flats. To regulate the apartment in its administration, the government issued Law No. 20 of 2011 concerning Flats. One of the stipulations in the regulation is the implementation of flats aimed at ensuring the realization of livable and affordable flats in a healthy, safe, harmonious and sustainable environment and creating integrated settlements to build economic, social and cultural resilience. The Government issued Law No. 20 of 2011 concerning Flats that regulate development actors or business entities that carry out the construction of flats. Nevertheless, based on research conducted at the end of 2019, flats have not met the indicators of a decent house.

Therefore this study aims to find out the right to adequate housing for the community of simple flats for rent (rusunawa) in terms of Human Rights associated with Law No. 20 of 2011 concerning flats and for fulfilling the right to adequate housing for the community in Cingised Bandung simple flats for rent based on Human Rights and Law No. 20 of 2011 concerning Flats.

This research method uses a normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques used in this research are literature study and analytical methods using qualitative juridical as well as using systematic interpretation to connect more than one legislation.

The results of this study are the fulfillment of the right to adequate housing for the community in simple flats of cingised rental that has not been optimally fulfilled. Because in practice the facility indicators as described previously that of each Sarusun unit occupancy should have enough space and the availability of privacy space for children and parents. This means that it is expected that each residential unit of Sarusun has 2 rooms. But in practice there is only room that has been divided into the main room, kitchen space and bathroom.

Keywords: *Simple Rental Apartments, Decent House Indicator, Privacy Space*